



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900.1.1 / 2630 /415.44/2024
100.3.7.1/ 22 /Pimp.DPRD/415.14/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

**TENTANG

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900.1.1 / 2630 /415.44/2024
100.3.7.1/ 22 /Pimp.DPRD/415.14/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

**TENTANG
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Jombang, 31 Juli 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI JOMBANG

 Selaku
PIHAK PERTAMA
Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

KABUPATEN JOMBANG

Selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA

DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA

FARID AL FARISI
WAKIL KETUA

ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA KESEPAKATAN ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tujuan 1

 1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 6

 2.1. Target Pendapatan Daerah 6

 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)7

 2.1.2. Pendapatan Transfer9

 2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah10

 2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah 10

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 12

 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional..... 13

 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi. 28

 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah..... 44

 3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja..... 61

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 62

 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 62

 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja..... 63

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 64

 5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan 64

 5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan 64

BAB VI PENUTUP..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.	10
Tabel 3. 1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	14
Tabel 3. 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	28
Tabel 3. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	44
Tabel 3. 4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	61
Tabel 4. 1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	62
Tabel 4. 2 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	63
Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	64

1.1. Latar Belakang

Penyusunan anggaran merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan yang bertahap dari penetapan kebijakan pemerintah daerah yang diturunkan hingga teknis kegiatan di masing-masing unit kerja perangkat daerah. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD. Sehingga KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Jombang berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Tahun 2025, serta berpedoman pada kebijakan terbaru tentang sinkronisasi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional dengan KEM PPKF sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2025, dokumen PPAS menjadi gambaran umum kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang berasal dari penerimaan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Jombang di masa mendatang. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
2. Sinergitas program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap prioritas pembangunan nasional.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

4. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

- Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor X);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 117-10/2020);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20222 Nomor 6/A);

25. Peraturan Bupati Jombang No. 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/e).
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 45/2024).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer terdiri atas :

1. Transfer Pemerintah Pusat
2. Transfer Antar Daerah

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :

1. Hibah
2. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komposisi penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari SiLPA yang merupakan hasil efisiensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta juga pelampauan atas target pendapatan Daerah.

2.1. Target Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jombang direncanakan secara bruto pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.440.188.287.044,00. Rencana pendapatan daerah tersebut disusun berdasarkan atas realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan bulan mei Tahun 2024, serta

perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sampai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2025, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan semakin membaik baik secara nasional maupun regional yang berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target PAD pada Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp.745.549.706.014 atau naik sebesar 25,72 persen dibandingkan dengan target penerimaan Tahun 2024. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Adapun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dari target pendapatan Tahun 2024 yakni sebesar Rp.132.189.602.400 atau 73,36 persen. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada semua jenis pajak daerah juga disebabkan karena implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis pajak yang mengalami kenaikan antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Hotel,Wisma Pariwisata,Rumah Penginapan/*Guest House/Bungalow/Resort/Cottage*, Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel naik menjadi Rp.1.600.000.000, Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Restoran dan Penyedia Jasa Boga atau Katering mengalami kenaikan 200 persen sehingga menjadi Rp.9.000.000.000, Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar Rp.150.000.000, Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu dan Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor naik sebesar Rp.30.000.000 atau 18,75 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebesar Rp.84.000.000.000, Pajak Reklame naik sebesar Rp.200.000.000 atau 11,11 persen, Pajak

Air Tanah naik sebesar Rp.600.000.000 atau 25 persen, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun sebesar Rp.450.000.000 atau 75 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan naik sebesar Rp.9.000.000.000 atau sebesar 19,57 persen dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan naik sebesar Rp.7.000.000.000 atau 16,28 persen. Atas implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat jenis objek pajak baru, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp75.970.178.699 dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.31.312.423.701 yang semula teralokasikan pada pendapatan transfer antar daerah sekarang menjadi PAD-Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah

Proyeksi Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sehingga menjadi Rp.16.051.817.827 dibandingkan dengan target penerimaan Tahun 2024. Prosentase kenaikan terbesar pada Retribusi Jasa Usaha yang mengalami kenaikan sebesar Rp.497.674.724 atau 10,56 persen, dengan penyumbang terbesar kenaikan ada pada retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi Jasa umum mengalami penurunan sebesar Rp.2.596.107.000 atau 19,34 persen yang disebabkan oleh penurunan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar serta Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan sebesar Rp.2.145.500.000 atau 94,91 persen yang disebabkan oleh penurunan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.8.273.752.694 mengalami kenaikan sebesar Rp.67.126.272 atau 0,82 persen bila dibandingkan dengan target penerimaan Tahun 2024 yang disebabkan oleh kenaikan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebesar Rp.135.250.554 namun juga mengalami penurunan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.68.124.282.

d. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.408.851.533.093 mengalami kenaikan sebesar Rp.24.622.369.093,47 dibandingkan dengan Tahun 2024 yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan BLUD sebesar Rp.27.923.194.093,47, kenaikan pada Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.20.000.000 dan kenaikan pada Pendapatan Bunga sebesar Rp.533.350.806,96 namun juga mengalami penurunan pada Jasa Giro sebesar Rp.720.372.188,83 dan penurunan pada Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.75.825.000.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa sedangkan Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer Tahun anggaran 2025 diproyeksikan menurun jika dibandingkan dengan alokasi pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp.1.694.638.581.030 atau menurun sebesar 23,59 persen. Hal utama yang menyebabkan proyeksi Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 menurun adalah karena belum dialokasikannya Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Non Fisik maupun DID. Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun DID belum teralokasikan dalam struktur APBD TA 2025 disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 atau bahkan informasi resmi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia. Selain itu, Pendapatan Transfer antar Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp.66.367.506.271 atau sebesar 33,54 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, hal ini disebabkan oleh belum dialokasikannya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan belum dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah didasarkan atas proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mendasarinya. Besaran proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.118.715.940.271 yang terdiri dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.98.715.940.271 dan proyeksi penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000.

Sebagaimana asumsi atas kondisi perekonomian serta berbagai kebijakan pada pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang tertuang dalam dokumen KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, rincian penerimaan daerah dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.440.188.287.044	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	745.549.706.014	
4.1.01	Pajak daerah	312.372.602.400	Perda No 13 Tahun 2023
4.1.02	Retribusi daerah	16.051.817.827	Perda No 13 Tahun 2023
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.273.752.694	Proyeksi
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	408.851.533.093	Proyeksi
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.694.638.581.030	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.563.122.714.030	Proyeksi didasarkan atas Permendagri 84 Tahun 2022
4.2.02	Transfer Antar Daerah	131.515.867.000	Proyeksi didasarkan atas Permendagri 84 Tahun 2022
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.01	Hibah	-	
4.3.02	Dana Darurat	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.440.188.287.044	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.715.940.271	
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	98.715.940.271	Proyeksi
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000	Proyeksi
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.715.940.271	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.558.904.227.315	

Sumber : BPKAD Tahun 2024

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal harus dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah berisi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran tahunan Pembangunan Daerah serta penyelesaian permasalahan Pembangunan Daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah, sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas Pembangunan Daerah, karena menyangkut keterbatasan anggaran.

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, juga memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Disamping itu juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur yaitu untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, meningkatkan inovasi dan penggunaan kemajuan teknologi informasi secara tepat, dan mengedepankan kerjasama lintas teknis, lintas sektor bahkan lintas kewilayahan agar dapat mewujudkan pembangunan yang sinergis lintas sektor, bertahap, dan berkelanjutan.

Mendasar pada tema dan prioritas nasional, tema dan prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam dokumen RPD maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah: **“HILIRISASI AGROBISNIS”** yang ditetapkan dalam 3 (tiga) prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis.
2. Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas.
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata.

Selanjutnya untuk Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3; dan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.4.

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2025 dirangkum ke dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
Prioritas I : Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis	1	Prioritas 1: SDM Berdaya Saing dan Produktif	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	4		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	5		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	6		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	7		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
	8		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
	9		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	
	10		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) 2. Persentase Desa UCI 3. Insiden Rate Penyakit Menular 4. Tingkat Kemandirian ODGJ Berat 5. Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar 6. Angka kematian Balita (AKBAL) 7. Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan RSUD Jombang RSUD Ploso	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
				8. Angka kematian Bayi (AKB) 9. Persentase kecamatan sehat 10. Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi 11. Prevalensi Stunting 12. Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar 13. Nilai Akreditasi RS (RSUD Jombang) 14. Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang (RSUD Jombang) 15. Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen (RSUD Jombang) 16. Persentase capaian SPM rumah sakit (RSUD Ploso) 17. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM penunjang layanan rujukan (RSUD Ploso)		
	11		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	12		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	13		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	14		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
	15		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa sudah menginisiasi Layak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	16		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	17		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada	Satpol PP	
	18		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2. Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	Bakesbangpol	
	19		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	
	20		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	
	21		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	
	22		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	
	23		Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	Dinas Sosial	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
	24		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	25		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	26		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	27		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	
	28		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesos tersertifikasi persentase LKS yang terakreditasi	Dinas Sosial	
	29		Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi 2. Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Dinas Sosial	
	30		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial 2. Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	
	31		Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani 2. Persentase desa siaga bencana yang aktif	Dinas Sosial	
	32		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
Prioritas II : Peningkatan Layanan Publik	33		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh PD	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	34		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD	BPKAD	
	35		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	BPKAD	
	36		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A 2. Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Inspektorat	
	37		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	
	38		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Badan Pendapatan Daerah	
	39		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	40		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	41		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	42		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	
	43		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa yang perencanaan	Kecamatan	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
			Desa Dan Kelurahan	pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif		
	44		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan	
	45		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	
	46		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	47		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Berkategori Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	48		Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	Dispendukcapil	
	49		Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Cakupan Perekaman KTP el 2. Persentase Cakupan kepemilikan KIA 3. Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dispendukcapil	
	50		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun 2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi 3. Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dispendukcapil	
	51		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase layanan bantuan hukum dan produk hukum yang ditetapkan tepat waktu. 2. Prosentase rata-rata peningkatan indeks kualitas kebijakan bidang Hukum 3. Jumlah laporan pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum 4. Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	Sekretariat Daerah	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
				5. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 6. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 7. Jumlah monev kebijakan bidang Kesra 8. Jumlah kebijakan bidang Perekonomian 9. Jumlah monev kebijakan bidang Perekonomian 10. Jumlah kebijakan bidang pembangunan 11. Jumlah monev kebijakan bidang pembangunan 12. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-Undangan 13. Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 14. Persentase produk hukum yang sesuai kaidah hukum 15. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 16. Persentase Kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu		
	52		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan 2. Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi 3. Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM) 4. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian 5. Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program,	Sekretariat Daerah	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
				monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa		
	53		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	
	54		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	DPMPTSP	
	55		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	
	56		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
	57		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	58		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	59		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	60		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	61		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	
Prioritas III : Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata	62	Prioritas 2: Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	63	Prioritas 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	64	Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	65		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
		Penciptaan Produk Ramah Lingkungan		standar		
	66		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	67		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	68		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	69		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	70		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perizinan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	71		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT)	Dinas Pertanian	
	72		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	73		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	74		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Olah Tanah) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Panen) 3. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Penanaman)	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
				4. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Pengairan) 5. Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai		
	75		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	76		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Dinas Peternakan	
	77		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	78		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi) 2. Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	79		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	80		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	81		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	82		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	83		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	84		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
			Mikro (UMKM)			
	85		Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	86		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan	DPMPTSP	
	87		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	DPMPTSP	
	88		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	DPMPTSP	
	89		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	90		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	91		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	92		Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	93		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	94		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Prosentase Peningkatan status BUMDes/ BUMDesma 2. IKM Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes 4. IPP Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	95		Program Peningkatan Kerjasama	Prosentase desa yang melakukan kerjasama	Dinas	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
			Desa	aktif	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	96		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	97		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	98		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	99		Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik 2. Persentase jalan dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	100		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	101		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	102		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	103		Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	104		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas 2. Persentase Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik	Dinas Perhubungan	
	105		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Presentase Fasilitas Perlindungan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan	Dinas Perhubungan	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
				yang optimal		
	106		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	107		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	108		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	109		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	110		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	111		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak per tahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	112		Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	113		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
	114		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
	115		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LingkunganHidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	
	116		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
	117		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
	118		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

Kabupaten	No	Prioritas Pembangunan Nasional	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SKPD Pelaksana	Ket
			Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
	119		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	
	120		Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	
	121		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	
	122		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	
	123		Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 2. Persentase pencari kerja yang berwirausaha mandiri	Dinas Tenaga Kerja	
	124		Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	
	125		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	126		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	127		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	128		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dirinci ke dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
Prioritas I : Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis	1	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Prioritas 2: Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan Prioritas 3: Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Prioritas 4: Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kebermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	4		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	5		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	6		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	7		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
	8		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi	Dinas Kesehatan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				Standar		
	9		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	
	10		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Universal Health Coverage (UHC) 2. Persentase Desa UCI 3. Insiden Rate Penyakit Menular 4. Tingkat Kemandirian ODGJ Berat 5. Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar 6. Angka kematian Balita (AKBAL) 7. Angka Kematian Ibu 8. Angka kematian Bayi (AKB) 9. Persentase kecamatan sehat 10. Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi 11. Prevalensi Stunting 12. Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar 13. Nilai Akreditasi RS (RSUD Jombang) 14. Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang (RSUD Jombang) 15. Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen (RSUD Jombang) 16. Persentase capaian SPM rumah sakit (RSUD Ploso) 17. Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM penunjang layanan rujukan (RSUD Ploso)	Dinas Kesehatan RSUD Jombang RSUD Ploso	
	11		Program Pembinaan Keluarga	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
			Berencana (KB)		Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	12		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang terupdate tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	13		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	14		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	15		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa sudah menginisiasi Layak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	16		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
	17		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada	Satpol PP	
	18		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan	Bakesbangpol	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2. Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila		
	19		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	
	20		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	
	21		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	
	22		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	
	23		Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standart	Dinas Sosial	
	24		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	25		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	26		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	27		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	
	28		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesos tersertifikasi persentase LKS yang terakreditasi	Dinas Sosial	
	29		Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi 2. Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi		
	30		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial 2. Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	
	31		Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani 2. Persentase desa siaga bencana yang aktif	Dinas Sosial	
	32		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
Prioritas II : Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	33	Prioritas 5: Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh PD	
	34		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD	BPKAD	
	35		Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase SKPD yang menyusun	BPKAD	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
			Daerah	Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat		
	36		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A 2. Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Inspektorat	
	37		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	
	38		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Badan Pendapatan Daerah	
	39		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	40		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	41		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	42		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	
	43		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Kecamatan	
	44		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 2. Persentase rekomendasi Forkopimcam	Kecamatan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				yang ditindaklanjuti		
	45		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	
	46		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	47		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Berkategori Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	48		Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	Dispendukcapil	
	49		Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Cakupan Perekaman KTP el 2. Persentase Cakupan kepemilikan KIA 3. Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dispendukcapil	
	50		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun 2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi 3. Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dispendukcapil	
	51		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase layanan bantuan hukum dan produk hukum yang ditetapkan tepat waktu/ 2.Prosentase rata-rata peningkatan indeks kualitas kebijakan bidang Hukum 3.Jumlah laporan pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	Sekretariat Daerah	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				4.Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan 5. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 6. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 7.Jumlah monev kebijakan bidang Kesra 8.Jumlah kebijakan bidang Perekonomian 9.Jumlah monev kebijakan bidang Perekonomian 10.Jumlah kebijakan bidang pembangunan 11.Jumlah monev kebijakan bidang pembangunan 12.Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-Undangan 13.Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 14.Persentase produk hukum yang sesuai kaidah hukum 15.Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 16.Persentase Kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu		
	52		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan 2. Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi 3. Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	Sekretariat Daerah	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				4. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian 5. Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa		
	53		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	
	54		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	DPMPTSP	
	55		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	
	56		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
	57		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	58		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	59		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	60		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	61		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	
Prioritas III : Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata	62	Prioritas 6: Pembangunan infrastruktur	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	63	pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	Dinas Perdagangan dan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
		Prioritas 7:			Perindustrian	
	64	Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	65	Prioritas 8:	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	66	Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	67	Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintah desa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	68	Prioritas 9:	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	69	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	70		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perizinan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	71		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT)	Dinas Pertanian	
	72		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
	73		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	74		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Olah Tanah) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Panen) 3. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Penanaman) 4. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Pengairan) Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	75		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Persentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
	76		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Dinas Peternakan	
	77		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	78		Program Peningkatan Diversifikasi Dan	1. Persentase capaian konsumsi pangan	Dinas Ketahanan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
			Ketahanan Pangan Masyarakat	terhadap AKG (Energi) 2. Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)	Pangan & Perikanan	
	79		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	80		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	81		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	82		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	83		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
	84		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	85		Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	86		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan	DPMPTSP	
	87		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	DPMPTSP	
	88		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	DPMPTSP	
	89		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
					Pariwisata	
	90		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	91		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	92		Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	93		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	94		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Prosentase Peningkatan status BUMDes/ BUMDesma 2. IKM Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes 4. IPP Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	95		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	96		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	97		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara	Dinas Pekerjaan	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				yang telah diverifikasi	Umum dan Penataan Ruang	
	98		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	99		Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik 2. Persentase jalan dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	100		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	101		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	102		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	103		Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	104		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas 2. Persentase Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik	Dinas Perhubungan	
	105		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Perlindungan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal	Dinas Perhubungan	
	106		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	107		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
	108		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	109		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	110		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	111		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	112		Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	113		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
	114		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
	115		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	
	116		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
	117		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
	118		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	119		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	
	120		Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	

Kabupaten	No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	KET
				2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	121		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	
	122		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	
	123		Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 2. Persentase pencari kerja yang berwirausaha mandiri	Dinas Tenaga Kerja	
	124		Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	
	125		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	126		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	127		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	128		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Berdasarkan tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jombang berdasarkan prioritas daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
1	Prioritas I: Peningkatan Kualitas SDM. Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.757.521.465	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.712.631.350	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kebermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	419.887.838	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	619.929.900	
			Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	400.000.000	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.190.287.400	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	150.289.700	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	122.819.450	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	303.241.000	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	1.Universal Health Coverage (UHC)	Dinas Kesehatan RSUD Jombang	518.133.682.629	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Upaya Kesehatan Masyarakat	2.Persentase Desa UCI 3.Insiden Rate Penyakit Menular 4.Tingkat Kemandirian ODGJ Berat 5.Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BHP di Puskesmas sesuai standar 6.Angka kematian Balita (AKBAL) 7.Angka Kematian Ibu 8.Angka kematian Bayi (AKB) 9.Persentase kecamatan sehat 10.Insiden Rate Diabetes Mellitus dan Hipertensi 11.Prevalensi Stunting 12.Persentase Fasilitas Kesehatan Memenuhi Standar 13.Nilai Akreditasi RS (RSUD Jombang) 14.Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang (RSUD Jombang) 15.Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen (RSUD Jombang) 16.Persentase capaian SPM rumah sakit (RSUD Ploso) 17.Persentase capaian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM penunjang layanan rujukan (RSUD Ploso)	RSUD Ploso		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	435.096.800	
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang terupdate tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	40.948.900	
		Sasaran 3: Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	296.106.500	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tindak kekerasan pada perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	87.556.950	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa sudah menginisiasi Layak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	147.234.500	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	126.954.000	
		Sasaran 4: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada	Satpol PP	3.072.294.654	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2. Prosentase kaderisasi calon	Bakesbangpol	829.167.100	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila			
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	5.679.580.075	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	5.533.235.100	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	171.638.800	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	606.083.800	
			Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar	Dinas Sosial	104.308.160	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	927.506.550	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.846.896.000	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	894.316.140	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	178.417.200	
		Sasaran 11:	Program Pemberdayaan	Persentase SDM Kesos	Dinas Sosial	1.381.611.750	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.	Sosial	tersertifikasi persentase LKS yang terakreditasi			
			Program Rehabilitasi Sosial	1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi 2. Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi	Dinas Sosial	1.776.349.350	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial 2. Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	15.246.513.388	
			Program Penanganan Bencana	1.Persentase Korban Bencana yang tertangani 2. Persentase desa siaga bencana yang aktif	Dinas Sosial	522.799.700	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	360.426.200	
2	Prioritas II : Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh PD	1.045.347.332.467	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian	BPKAD	506.410.727.350	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD			
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	BPKAD	2.028.815.841	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A 2. Persentase unit kerja yang mendapat 3.Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Inspektorat	2.612.352.497	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	746.768.200	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Badan Pendapatan Daerah	5.757.469.278	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.214.214.650	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.559.609.801	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	755.086.550	
			Program Penyelenggaraan	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	135.224.800	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Kecamatan	7.164.077.568	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan	2.814.681.642	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	187.859.200	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.141.000	
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Berkategori Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.638.450	
			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	Dispendukcapil	89.204.500	
			Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Cakupan Perekaman KTP el 2. Persentase Cakupan kepemilikan KIA 3. Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dispendukcapil	117.370.000	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun 2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi	Dispendukcapil	191.892.096	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				informasi 3. Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)			
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase layanan bantuan hukum dan produk hukum yang ditetapkan tepat waktu/ 2. Prosentase rata-rata peningkatan indeks kualitas kebijakan bidang Hukum 3. Jumlah laporan pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum 4. Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan 5. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 6. Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan 7. Jumlah monev kebijakan bidang Kesra 8. Jumlah kebijakan bidang Perekonomian 9. Jumlah monev kebijakan bidang Perekonomian 10. Jumlah kebijakan bidang pembangunan 11. Jumlah monev kebijakan bidang pembangunan 12. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan	Sekretariat Daerah	21.342.665.030	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				Penyusunan Perundang-Undangan 13. Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 14. Persentase produk hukum yang sesuai kaidah hukum 15. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 16. Persentase Kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu			
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan 2. Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi 3. Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM) 4. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian 5. Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	1.751.827.100	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	155.000.000	
			Program Pelayanan	Persentase layanan perizinan	DPMPTSP	263.313.200	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Penanaman Modal	yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP			
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	3.091.201.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	1.925.821.044	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.731.361.700	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.576.698.265	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	193.620.450	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data Sektor yang dipublikasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	322.832.400	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	54.257.566.000	
3	Prioritas III : Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata	Sasaran 5: Meningkatnya PDRB unggulan dan Investasi Daerah.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.543.200.000	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	773.311.200	
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	647.982.400	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	120.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	185.000.000	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	977.000.000	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.000.000	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perizinan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT)	Dinas Pertanian	7.403.898.035	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	691.789.979	
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	6.433.489.533	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	12.244.601.018	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				(Sarana Olah Tanah) 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Panen) 3. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Penanaman) 4. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Pengairan) 5. Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai			
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	171.130.129	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Dinas Peternakan	403.599.432	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	225.228.070	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi) 2. Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Protein)	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	845.557.487	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	114.000.000	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	740.000.000	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	665.491.280	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	101.839.610	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	170.113.200	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	606.945.000	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	293.055.000	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan	DPMPTSP	172.645.900	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	DPMPTSP	647.355.200	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	DPMPTSP	176.660.000	
		Sasaran 6: Meningkatnya Kunjungan Wisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.069.821.900	
			Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	752.749.718	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
					Pariwisata		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	824.999.633	
		Sasaran 7: Meningkatkan Keberdayaan Desa.	Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.999.680	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	795.047.101	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Prosentase Peningkatan status BUMDes/ BUMDesma 2. IKM Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes 4. IPP Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	418.922.300	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000	
		Sasaran 8: Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar wilayah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.709.191.628	
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.212.396.893	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.853.080	
			Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik 2. Persentase jalan dalam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.857.740.866	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
				kondisi mantap			
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.633.552.570	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.773.652.550	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.667.500	
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.350.000	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas 2. Persentase Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik	Dinas Perhubungan	16.751.751.752	
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Perlindungan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal	Dinas Perhubungan	752.326.000	
		Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.575.000.000	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	7.556.983.581	
			Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	10.035.830.732	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.942.311.800	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	903.308.000	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak per tahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.600.000.000	
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	330.616.500	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	504.966.950	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	10.706.589.630	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	1.629.163.750	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	2.370.623.250	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	237.000.100	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	359.872.100	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	80.469.300	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)	KET
			Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	960.417.700	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	249.553.700	
		Sasaran 10: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	375.000.150	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 2. Persentase pencari kerja yang berwirausaha mandiri	Dinas Tenaga Kerja	1.187.900.000	
			Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	1.975.000.000	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	163.620.000	
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	43.488.150	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	145.380.000	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	56.511.850	

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Di bawah ini Tabel 3.4 disampaikan program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dimana dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun yang juga akan disinkronkan dengan rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

Untuk lebih memahami plafon anggaran maka akan lebih mudah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah, maka plafon anggaran sementara untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dirinci dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	1.837.589.209.405
5:01:01	Belanja Pegawai	946.400.950.606
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	807.829.224.716
5:01:04	Belanja Subsidi	
5:01:05	Belanja Hibah	75.120.561.583
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	8.238.472.500
5.2	BELANJA MODAL	197.359.897.542
5:02:01	Belanja Modal Tanah	11.076.250.000
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.588.922.276
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.133.626.701
5:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.941.598.565
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya	619.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.410.512.545
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.410.512.545
5.4	BELANJA TRANSFER	493.544.607.823
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	32.842.442.023
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	460.702.165.800
JUMLAH BELANJA		2.538.904.227.315

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2024

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Komponen penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pada Tahun 2025 komponen penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.98.715.940.271 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Komponen pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo. Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebesar Rp.20.000.000.000. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.98.715.940.271 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	118.715.940.271
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	98.715.940.271
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		118.715.940.271
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	
6:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000
6:02:04	Pemberian pinjaman daerah	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		20.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		98.715.940.271

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2024

BAB VI PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah dan adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Dengan adanya amanat dari pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional bahwa dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF. Jika kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS telah dilakukan sebelum hasil penilaian disampaikan, maka hasil penilaian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jombang, 31 Juli 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pj. BUPATI JOMBANG

Selaku
PIHAK PERTAMA

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

KABUPATEN JOMBANG

Selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA
DONNY ANGGUN, S.Sos

WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA